



PENETAPAN

Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA Srog

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Ridwan bin La Anci, TTL/umur Buton, 1 Juli 1989/ 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Misol, Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, sebagai **Pemohon I**;

Sufita binti La Ando, TTL/umur Madongko, 08 April 1993/ 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1 PGSD, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Jalan Misol, Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 03 Mei 2017 telah mengajukan Permohonan Istbat Nikah yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 0036/Pdt.P/2017/PA Srog. tanggal 03 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Mei 2016, yang dilaksanakan di Waisai Kota dengan wali Hakim nikah bernama: Imam Hanaafi, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya

Halaman 1 of 11 halaman,
Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing-masing bernama: Ainudin dan Mulia Nur dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gr;
2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejak dan Perawan;
 3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Dwi Utami Febriana, lahir di Waisai 17 Februari 2017 ;
 4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam;
 5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
 6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN (Petugas Pencatat Nikah) kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Distrik Waigeo Selatan, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan;
 7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Raja Ampat;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Ridwan bin La Anci) dengan Pemohon II (Sufita binti La Ando) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2016 di Waisai Kota;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Selatan,
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 2 of 11 halaman,
Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan. Dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya. Lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Raja Ampat, NIK. 9205030107890014 tanggal 01 Agustus 2016, atas nama Ridwan (Pemohon I), telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah di nazegeben, diberi tanda Bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Raja Ampat, NIK. 7404074804930001 tanggal 01 Agustus 2016, atas nama Sufita (Pemohon II), telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah di nazegeben, diberi tanda Bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **HARTADI MULYONO bin BASRI**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota TNI, bertempat tinggal di Pos TNI AL Marinir, Kelurahan Sapordanco, Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku teman dekat Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah di Waisai Kota pada tanggal 25 Mei 2016
 - Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan saksi ikut hadir bersama pihak keluarga dan para tetangga dalam proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 of 11 halaman,
Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan mereka dilakukan dengan wali hakim yaitu Bapak Muhammad Hanafi, Imam Masjid Agung Waisai yang mendapat mandat sesaat sebelum akad nikah melalui telepon dari ayah kandung Pemohon II dengan saksi nikah dua orang yaitu Bapak Ainudin dan Bapak Mulia Nur;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Muhammad Hanafi, Imam Masjid Agung Waisai, dan maskawinnya adalah cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan sampai saat ini tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang komplain terhadap perkawinan mereka;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;

2. MUHAMMAD MUKHLIS SYAIKHU bin KHAIRUL HUDA, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota TNI AL, bertempat tinggal di Pos TNI Marinir, Kelurahan sapordanco, Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku teman dekat Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah di Waisai Kota pada tanggal 25 Mei 2016
- Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan saksi ikut hadir bersama pihak keluarga dan para tetangga dalam proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan mereka dilakukan dengan wali hakim yaitu Bapak Muhammad Hanafi, Imam Masjid Agung Waisai yang mendapat mandat sesaat sebelum akad nikah melalui telepon dari ayah kandung Pemohon II dengan saksi nikah dua orang yaitu Bapak

Halaman 4 of 11 halaman,
Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ainudin dan Bapak Mulia Nur;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Muhammad Hanafi, Imam Masjid Agung Waisai, dan maskawinnya adalah cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan sampai saat ini tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang komplain terhadap perkawinan mereka;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II disamping telah menyampaikan bukti tulis tersebut para Pemohon juga melampiri Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Selatan dengan Nomor Kd.33.05/PW-01/36/V/2017 tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi selain alat bukti yang sudah diajukan di atas;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mereka tetap pada permohonannya dan mohon segera dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sorong tanggal 09 Mei 2017 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai

Halaman 5 of 11 halaman,
Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan agama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II maka pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan ke Pengadilan Agama Sorong sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan, maka secara formil, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar perkawinannya dinyatakan sah karena perkawinan mereka yang dilakukan pada tanggal 25 Mei 2016, yang dilaksanakan di Waisai Kota, tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Selatan, Perkawinan tersebut dilakukan dengan wali hakim bernama : Bapak Muhammad Hanafi, Imam Masjid Agung Waisai, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: Ainudin dan Mulia Nur dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram tunai;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan juga untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Raja Ampat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli Surat Keterangan dari KUA Distrik Waigeo Selatan dengan Nomor Kd.33.05/PW-01/36/V/2017 tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi untuk memperkuat dalil permohonannya;

Halaman 6 of 11 halaman,
Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat, baik formil maupun materil sebagai saksi. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan, di mana isi keterangan keduanya pada pokoknya bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 25 Mei 2016 di Waisai Kota dengan wali nikah wali hakim bernama: Bapak Muhammad Hanafi, Imam Masjid Agung Waisai, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: Ainudin dan Mulia Nur dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gr;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa tidak ada hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menyebabkan dilarangnya pernikahan antara keduanya, baik menurut peraturan perUndang-Undangan maupun menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa selama ini tidak ada orang lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Mei 2016 yang dilaksanakan di Waisai Kota dengan wali nikah wali hakim bernama Muhammad Hanafi, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: Ainudin dan Mulia Nur dengan mas kawin berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;

Halaman 7 of 11 halaman,
Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan yang dapat menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Islam;
- Bahwa Pemohon I selama menikah dengan Pemohon II tidak pernah menikah dengan perempuan lain, dan selama ini tidak orang lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) (e) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, antara lain, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak melanggar halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2016, dan ternyata dalam perkawinan yang tersebut tidak terdapat pelanggaran terhadap halangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Maka permohonan itsbat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 25 Mei 2016 yang dilaksanakan di Waisai Kota, telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Dengan demikian perkawinan tersebut sah

Halaman 8 of 11 halaman,
Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya. Dan karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu"*

Menimbang, bahwa sebagai aplikasi dari Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 yang memerintahkan melakukan pencatatan untuk setiap terjadi transaksi/ peristiwa hukum. Maka khusus untuk bukti adanya pernikahan tersebut pencatatan menjadi suatu keharusan pula;

Menimbang, bahwa berdasar pada pasal 34,35 dan 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, disamping untuk memberikan perlindungan hukum, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum pada setiap peristiwa kependudukan/ peristiwa penting yang di alami oleh Penduduk Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II harus diperintahkan untuk mendaftarkan/ mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 of 11 halaman,
Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Ridwan bin La Anci**) dengan Pemohon II (**Sufita binti La Ando**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2016 di Waisai Kota;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Selatan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Sorong pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh **Moh. Nur. Sholahuddin, S.H.I.** sebagai Hakim tunggal, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Nuryanto, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Tunggal

Moh. Nur. Sholahuddin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nuryanto, S.H.I.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Proses	Rp	50.000
3.	Redaksi	Rp	5.000
4.	Meterai	Rp	6.000
Jumlah		Rp	91.000

Terbilang : sembilan puluh satu ribu rupiah

Halaman 10 of 11 halaman,
Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 of 11 halaman,
Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2017/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)